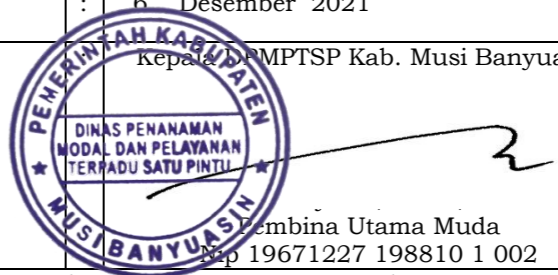
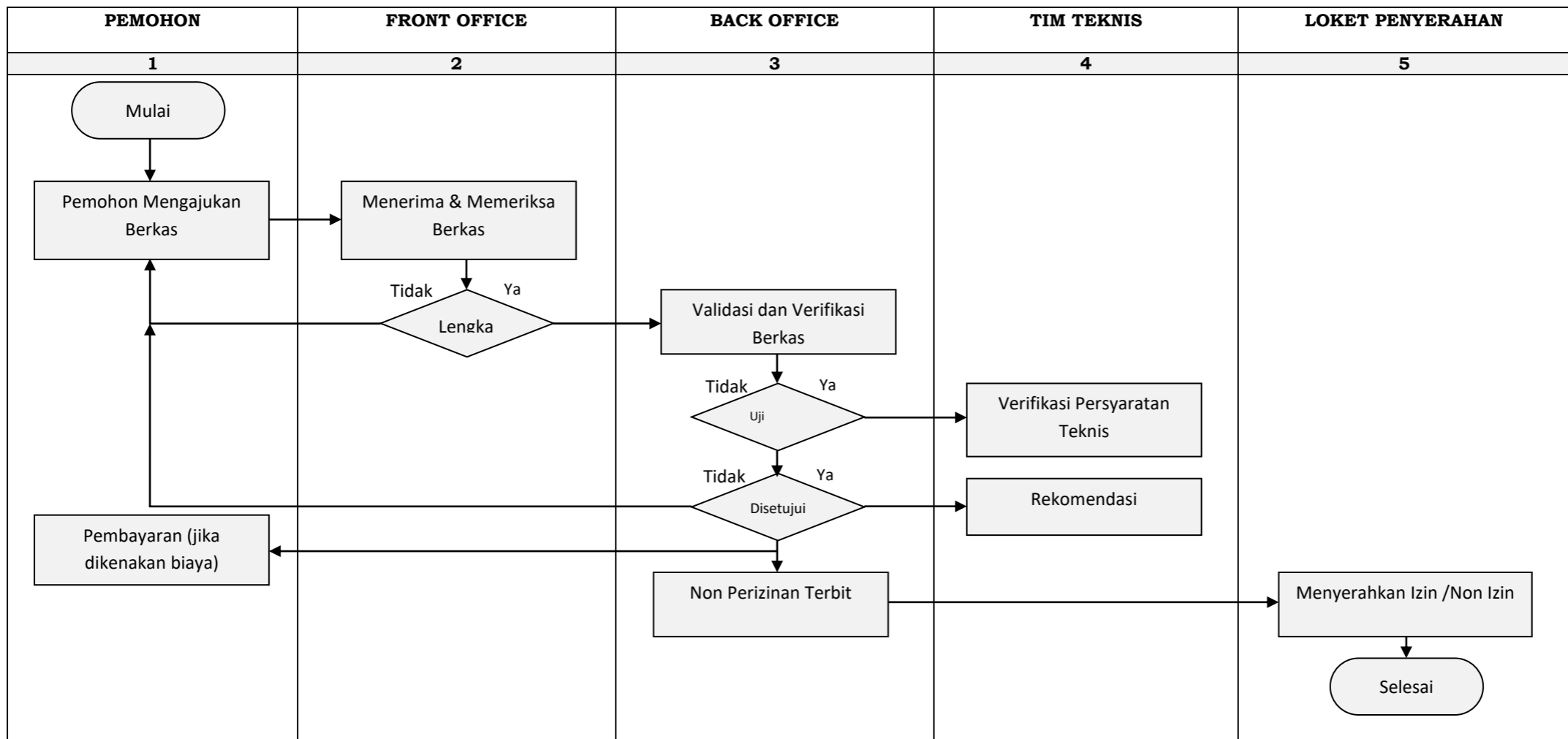
	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 364 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002	Nama SOP	Izin Praktek Perawat Anestesi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTESI

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin
Consumer : Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTESI**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Fotokopi KTP Fotokopi Ijazah yang dilegalisir Fotokopi STR-PA yang masih berlaku Surat Keterangan Sehat dari dokter Surat Keterangan bekerja dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Rekomendasi dari atasan langsung empat bekerja Fotokopi SIKPA pertama (untuk permohonan SIKPA yang kedua) 	-	-	60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar	5 tahun	-

Lampiran : IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTESI

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Izin Kerja Perawat Anestesi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Fotokopi KTP 8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir 9. Fotokopi STR-PA yang masih berlaku 10. Surat Keterangan Sehat dari dokter 11. Surat Keterangan bekerja dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan 12. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 13. Rekomendasi dari atasan langsung empat bekerja 14. Fotokopi SIKPA pertama (untuk permohonan SIKPA yang kedua) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	<p>Gratis</p>	<p>60 (enam puluh) menit dihitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar</p>